

---

# SANTRI, POLITIK DAN KEKUASAAN (Perspektif Teori Sosial dalam Memahami Pergulatan Politik Kaum Santri dengan Kekuasaan)

Oleh: *M. Khusna Amal*

*Asisten Ahli Sejarah dan Peradaban Islam STAIN Jember*

## Abstrak

*Terdapat fenomena unik terkait dengan masalah persinggungan politik kaum santri dalam ranah kekuasaan. Tindakan politik kaum santri dalam mencari, menggunakan, dan melanggengkan kekuasaan sudah ditempuh melalui mekanisme politik yang bersifat legal-rasional yakni dengan instrumen partai politik, di samping pula dilakukan melalui proses-proses politik seperti negosiasi, koalisi, aliansi, dan konfrontasi politik. Di samping itu, rasionalisasi terhadap simbol-simbol agama dimanfaatkan pula guna mencapai tujuan yang telah ditetapkannya itu. Dalam konteks ini, pilihan tindakan politik kaum santri, meminjam terminologi Max Weber, merupakan suatu tipologi tindakan yang rasional (*rational choice*).*

**Kata Kunci:** Kaum Santri, Pergulatan Politik, dan Kekuasaan

## Pendahuluan

Politik bukan sekedar urusan sekelompok orang tertentu. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan sama dalam berpolitik. Kaum santri, merupakan elemen sosial yang selama ini juga peduli dan berkiprah dalam dunia politik. Proses-proses perpolitikan yang diikuti kaum santri tidak lain dalam kerangka partisipasi politik. Karena santri pun sadar bahwa dirinya merupakan *social agents* yang perannya akan cukup menentukan dalam

proses pembangunan demokratisasi politik di negeri ini. Terlebih lagi, demokrasi secara idiil dan empiris belum dapat diwujudkan secara baik dalam kehidupan politik sehari-hari. Kalam Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa demokrasi yang berarti kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Afan Gaffar, 2000: viii), bagaikan api jauh dari panggangnya.

Sementara itu, pergumulan santri

dengan dunia perpolitikan itu sendiri bukan tanpa kepentingan atau tendensi. Memperebutkan kekuasaan (*power*) dapat diidentifikasi sebagai satu variable dari kepentingan tersebut. Terlepas, apakah kekuasaan politik itu diorientasikan untuk kepentingan penciptaan kemaslahatan umat sebagaimana seruan moralitas agama, ataukah hanya sebatas memenuhi kepentingan ambisi pribadinya. Kedua aspek ini telah mengendap menjadi satu kesatuan dalam perpolitikan kaum santri, sehingga susah untuk dideteksi mana di antara kedua aspek itu yang paling menonjol. Platform politik kaum santri jelas menempatkan kepentingan publik dominan atas kepentingan privat. Sementara, dilihat dari perilaku masing-masing individu, kesan pragmatisme politik jelas cukup menonjol.

Konflik-konflik politik baik di tingkat internal maupun antar partai politik menggambarkan indikasi yang tedas akan perebutan, pembagian dan pemertahanan (stabilitas) kekuasaan. Dalam proses-proses politik semacam inilah, negosiasi, konfrontasi, sampai pada penggunaan simbol-simbol agama dipergunakan. Nuansa pergulatan kepentingan praktis setiap aktor dalam konteks semacam itu tidak dapat dinafikan. Permasalahannya adalah bagaimana sebenarnya usaha-usaha politik kaum santri dalam mencari, mengelola dan mempertahankan kekuasaan?

## Politik dan Kekuasaan

Kekuasaan dapat dianggap sebagai satu substansi dari setiap diskursus politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohtar Maso'ed (1997: 75-76), setiap diskursus mengenai perpolitikan pasti melibatkan dimensi kekuasaan. Siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana, semakin menegaskan arti pentingnya kekuasaan dalam pemahaman politik. Hal ini bukan berarti menafikan rumusan konseptual politik yang cenderung menekankan aspek idealistik sebagaimana rumusan politik yang dikemukakan Plato dan Aristoteles yakni aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan manusia untuk dapat melakukan "pengejaran kepentingan umum (*public interest*) atau kebaikan bersama (*public good*), kebajikan masyarakat dan kesempurnaan moral". Dalam bukunya *The Ethics*, Aristoteles menulis bahwa "kebaikan paling tinggi adalah sasaran utama ilmu politik". Apa yang paling menjadi perhatian untuk dihasilkan oleh negarawan adalah satu karakter moral dalam diri sesama warga negara yakni watak menuju kebaikan dan perwujudan perilaku baik. Menurutnya, kebaikan dan moralitas bersama hanya dapat diwujudkan dalam, apa yang disebut Aristoteles, suatu polis. Di luar polis manusia menjadi sub-human (bianatang buas) atau superhuman (tuhan). Dan dari istilah polis (tatanan politik) lahir beberapa kunci konsep politik seperti politeia (konstitusi), polites (warga negara) dan politikos (negarawan). Meski secara umum



---

istilah polis diterjemahkan dengan "negara kota", bangsa Athena lebih suka menafsirkan politik yang berakar dari istilah polis dengan "proses yang digunakan orang untuk memperdebatkan hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan komunitas dan mengambil tindakan dalam usaha mewujudkan kebaikan umum" (Andrain, 1992: 17-18).

Robson, seorang ilmuwan yang menggagas pemahaman konseptual politik dalam hubungannya dengan kekuasaan, merumuskan politik sebagai perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan. Adapun prinsip dasar kekuasaan menurut perspektif pandangan ini dimaknai sebagai kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Jadi, kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi dengan pihak yang dipengaruhi (Surbakti, 1999: 5-6). Konsepsi ini berasal dari apa yang Leon Daguit namakan perbedaan antara yang memerintah (*governants*) dan yang diperintah atau dipengaruhi (*gouvernes*). Daguit melihat bahwa dalam setiap masyarakat atau kelompok manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar bisa dipastikan ada orang yang memerintah dan ada orang yang diperintah, ada yang membuat keputusan dan ada pula yang menaati keputusan (Duverger, 1989: 19-20).

Kekuasaan dalam konsep Dahl

diterjemahkan sebagai *power* yakni kemampuan seseorang mengontrol orang lain justru ketika orang lain tersebut sebenarnya tidak ingin melakukan sesuatu tindakan. Konsep kekuasaan Dahl ini kemudian dikritisi oleh Goodin dan Klingemann yang menganut persepektif Neo-Weberian dengan mengatakan bahwa "*Dahl's (1957) old Neo-Weberian definition still serves well enough. In those terms, X has power over Y insofar as: (i) X is able, in one way or another, to get Y to do something (ii) that is more to X's liking, and (iii) which Y would not otherwise have done*" (Zainuddin Maliki, 2004, 18-19).

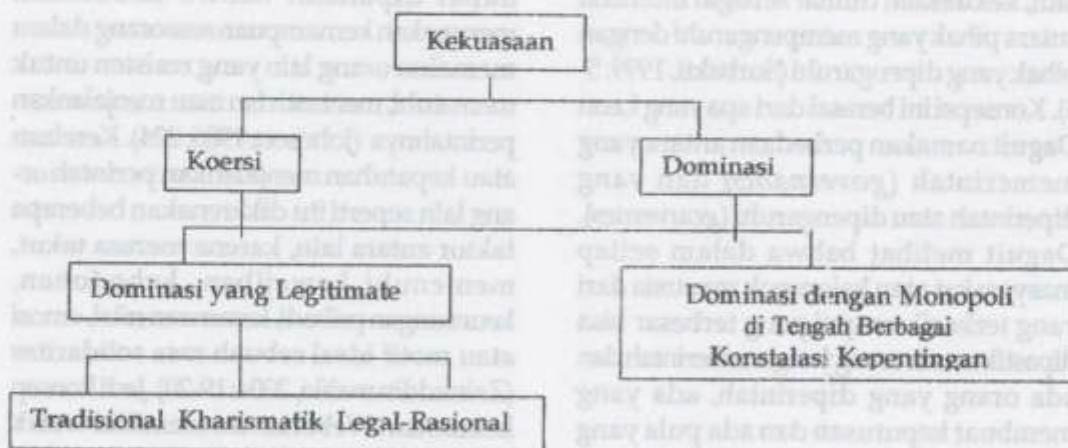
Sementara itu, Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai "*the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance, regardless of the basis upon which this probability rests*". Mengacu pada definisi ini, maka dapat dipahami bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang dalam memaksa orang lain yang resisten untuk mematuhi, mentaati dan mau menjalankan perintahnya (Johnson, 1986: 224). Kerelaan atau kepatuhan menjalankan perintah orang lain seperti itu dikarenakan beberapa faktor antara lain, karena merasa takut, memenuhi kewajiban, kebodohan, keuntungan pribadi, kesamaan nilai, emosi atau motif ideal sebuah rasa solidaritas (Zainuddin maliki, 2004: 19-20). Jadi konsep kekuasaan Weberian ini memiliki watak dominatif dan bahkan eksploitatif karena cenderung memaksakan kehendak kepada

orang lain dengan cara kekerasan sekalipun. Masih dalam perspektif Weberian, proses dominasi itu (baik dominasi yang terlegitimasi yang disebut dengan otoritas maupun dominasi atas dasar monopoli) dilakukan melalui berbagai pola pembentukan "otoritas" yakni kemungkinan di mana seseorang akan ditaati atas dasar suatu kepercayaan akan legitimasi haknya untuk mempengaruhi. Dalam hal ini, Weber membagi otoritas menjadi tiga bagian, yaitu: *pertama*, otoritas tradisional yang memiliki kecenderungan dalam mengkoduskan legitimasi status atau tradisi-tradisi zaman dulu; *kedua*, otoritas kharismatik yang cenderung menekankan aspek kewibawaan atau mutu luar biasa

yang dimiliki seseorang; dan *ketiga*, otoritas legal-rasional yang didasarkan pada seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Tipe yang ketiga ini sangat erat kaitannya dengan rasionalitas instrumental. Tipe ini berbeda dengan otoritas tradisional dan kharismatik dalam sifat impersonal pelaksanaannya (Johnson, 1986: 225-231).

Sementara itu, konsep kekuasaan dalam perspektif Neo-Marxian dapat dipahami dari pola tindakan rasional (*rational choice*). Jurgen Habermas menilai bahwa rasionalitas tindakan yang menekankan kepada pencarian instrumen (*zweckrationalitat*) yang mengacu kepada pencapaian tujuan setinggi-tingginya dan

Gambar 1:  
Hierarki Konsep Kekuasaan Menurut Weber





tidak mengindahkan rasionalitas nilai (*wertrationalität*), berkembang menjadi "totalitas historis" sebuah bentuk kehidupan (*Lebensform*) yang memenjara masyarakat. Dengan berselubung rasionalitas, kekuasaan politik pada hakekatnya menindas masyarakat itu sendiri. Cita-cita membangun masyarakat yang memiliki otonomi menjadi tidak tercapai (Zainuddin Maliki, 2004: 24-25).

Penerapan kekuasaan dilakukan bukan dengan persetujuan publik, melainkan dengan kekerasan, keputusan manipulatif, pembentukan opini secara persuasif, dan bahkan dengan praktik dominasi. Dalam konsep Marxisme ortodoks sebagaimana dikemukakan oleh Althusser, dominasi kekerasan (*violence*) dipakai penguasa dengan menggunakan instrumen yang disebut *Repressive State Apparatus (RSA)* dan menggunakan *Ideological State Apparatus (ISA)* (Zainuddin Maliki, 2004: 25).

Sementara itu, menurut Antonio Gramsci kekuasaan dominatif di era modern ini dipegang oleh negara. Para aparatus negara, khususnya di negara-negara berkembang, cenderung mempertahankan dan memperluas kekuasaannya dengan menggunakan instrumen kekerasan. Mereka membungkus kekerasan dengan memanipulasi sentimen masyarakat dan memberikan justifikasi politik dengan menggunakan ideologi tertentu, sehingga masyarakat menjadi termanipulasi dan tidak berdaya lagi dalam menyikapi kejahatan negara. Manipulasi kepercayaan

massa melalui kekuasaan yang diekspresikan dalam bentuk jalinan politik, sosial, budaya, melalui cara-cara persuasi serta mekanisme konsensus itulah yang dinamakan dengan hegemony (Zainuddin Maliki, 2004: 26; Roger Simon, 2000).

### Politik Kaum Santri dalam Mencari, Menggunakan, dan Mempertahankan Kekuasaan

Dalam perspektif kaum santri, politik bukan sekedar instrumen untuk mendapatkan kekuasaan dalam maknanya yang pragmatis yakni siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana. Bukan pula kekuasaan untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan mendominasi seseorang atau kelompok agar tunduk patuh melaksanakan keinginannya sebagaimana konsep Max Weber (Jonson, 1986: 224). Kekuasaan yang ingin diperoleh melalui instrumen politik adalah kekuasaan yang *legitimate* untuk menciptakan tatanan masyarakat madani, atau dalam bahasa al-Qur'an dikenal dengan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafurun*. Dengan demikian, tampak jelas bahwa moralitas politik kaum santri dalam melaksanakan aktivitas perpolitikan itu senantiasa dinafasi oleh nilai-nilai luhur keislaman yakni spiritualitas, religiusitas, dan bahkan transendentalitas. Kerena hakekat kekuasaan itu mutlak milik Allah, kekuasaan yang dimiliki manusia bersumber dan sebatas titipan dari-Nya.

Sementara itu, dalam konsep negara-bangsa modern, pusat kekuasaan terletak

pada negara yang terbagi ke dalam tiga komponen yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Meski sesungguhnya dalam kamus politik modern kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, namun dalam praktiknya, para aparat negaralah yang memegang dan mengendalikan kekuasaan. Melalui instrumen negara inilah, para aparatus pemerintahan memiliki kekuasaan sangat luas dalam menciptakan suatu konstruksi sosial sesuai dengan kehendaknya, terlebih lagi apabila rakyat dalam posisi lemah, maka peran dominatif negara semakin tidak terelakkan, sehingga yang terjadi adalah sebagaimana tesis Gramsci, negara menjadi alat yang efektif bagi penguasa untuk memaksakan kehendaknya, dan bukan untuk menciptakan kebaikan bersama. Politik kekuasaan negara bukan diorientasikan kepada penciptaan kebaikan bersama, melainkan alat yang digunakan sekelompok elit tertentu untuk kepentingan kekuasaannya. Dalam bahasa Paulo Freire (1999), kekuasaan negara itu lebih berpihak kepada kepentingan sekelompok elit daripada kepentingan rakyat secara umum. Dengan demikian, politik kekuasaan yang dijalankan (aparatus) negara itu cenderung dominatif, manipulatif, dan eksploitatif, dan bukan politik yang membebaskan dan memberdayakan.

Dalam konstalasi negara-bangsa modern itulah, percaturan politik kekuasaan menjadi realitas yang tidak terelakkan. Pada akhirnya, perebutan kapling kekuasaan di antara elemen-elemen

sosial diwarnai dengan berbagai varian kepentingan yang tidak sama. Dan yang cukup menonjol, dalam percaturan politik praktis ini adalah kepentingan yang bercorak pragmatis pula. Dalam konteks ini pula kaum santri terlibat dalam percaturan politik guna mendapatkan dan atau mempertahankan kekuasaan. Karena dengan terlibat langsung dalam perpolitikan praktis, maka kaum santri memiliki peran besar dalam mewarnai, mempergunakan, dan mengontrol kekuasaan. Sebab, minimnya kaum santri yang berkiprah dalam kekuasaan negara telah menjadikannya teralienasi, terpinggirkan, dan bahkan terkooptasi oleh penguasa yang sering memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (Din Syamsuddin, 2001; A. Gaffar karim, 1995).

Sadar bahwa kekuasaan negara atau pemerintahan mesti direbut dengan menggunakan instrumen politik praktis, maka langkah yang kemudian ditempuh kaum santri adalah mempergunakan instrumen tersebut yakni dengan cara mendirikan partai politik yang berafaskan keislaman sesuai dengan identitas kesantriannya. Pilihan tindakan yang dilakukan kaum santri ini, dalam perspektif Weber, merupakan tipologi tindakan yang rasional (*rational choice*). Sebab, dalam menentukan pilihan tindakannya ini kaum santri dengan sadar telah menetapkan tujuan dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya (Johnson, 1986: 220; Parson, 1974), dalam hal ini tujuannya adalah



memperebutkan kekuasaan dan alatnya adalah partai politik. Terlebih lagi, dalam konsep praktis, tujuan dan capaian yang dikehendaki dari politik praktis itu tiada lain adalah perebutan kapling kekuasaan baik di tingkat eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Terkait dengan konsep tindakan rasional tersebut, Weber menjelaskan: *Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri (zweckrational) apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif* (Johnson, 1986: 220).

Kaum santri, melalui proses-proses politik seperti negoisasi, koalisi, aliansi, dan konfrontasi dalam kerangka mencari, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan. Sebab kekuatan politik kaum santri yang terdapat pada parpol-parpol berbasis Islam tidak mencukupi untuk memperebutkan kekuasaan, melainkan melalui koalisi dan semacamnya. Hal ini tampak pada saat kaum santri memenangkan Abdurrahman Wahid dari PKB menjadi presiden hasil pemilu 1999. Koalisi yang dimotori poros tengah ternyata

cukup efektif menyatukan unsur-unsur kekuatan kaum santri dan parpol-parpol yang sehaluan untuk menghantarkan Abdurrahman Wahid menuju kursi kepresidenan. Oleh karena itu, ketika Abdurrahman Wahid berkuasa, maka mau tidak mau ia membagi dan menjalankan kekuasaannya dengan melibatkan unsur-unsur parpol yang tergabung dalam lingkaran koalisi. Pemertahanan kekuasaan pun dilakukan secara kolektif berdasarkan koalisi.

Demikian pula, ketika bangunan koalisi sudah tidak cukup kuat lagi yang mencuat kemudian adalah keretakan dan konflik. Pada kondisi demikian ini, poros kaum santri tidak lagi mempertahankan koalisinya yang dinilai tidak menguntungkan semua pihak, tindakan yang dipilih adalah melakukan koalisi dengan elemen-elemen politik yang lain agar tidak kehilangan kapling kekuasaan. Penurunan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan merupakan bukti keretakan koalisi kaum santri, dan merupakan gerakan politik sebagian kaum santri dalam melakukan koalisi dengan parpol lain yang *nota bene* tidak bernafaskan Islam. Sementara itu, kelompok Abdurrahman Wahid sendiri mempertahankan kekuasaan dengan cara melakukan konfrontasi politik. Akibatnya, kekalahan Abdurrahman Wahid dalam melakukan konfrontasi politik membawa dampak terhadap hilangnya kekuasaan yang selama ini diperoleh dan dijalankannya.

Tidak selamanya tindakan politik

kaum santri dalam mencari, menggunakan, dan mempertahankan kekuasaan ditempuh melalui mekanisme politik yang legal-rasional. Penggunaan simbol-simbol keagamaan merupakan instrumen politik penting yang turut dipergunakan. Cara semacam ini, meskipun tradisional, terbilang cukup efektif, khususnya dalam memperoleh dukungan massa guna memperebutkan kapling kekuasaan. Penggunaan simbol-simbol keagamaan tidak saja digunakan kaum santri, melainkan hampir semua parpol turut memanfaatkannya. Hal ini dapat dimengerti karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah santri/umat Islam. Pada saat pemilu, hampir dapat dipastikan setiap juru kampanye khususnya dari kaum santri menggunakan ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits serta lambang-lambang keagamaan untuk meyakinkan massa agar mau memilih partai politiknya.

Penggunaan simbol-simbol agama ini, tidak saja terlihat marak pada saat kampanye pemilihan umum, tetapi juga pada saat pelaksanaan kekuasaan yang dipegang dan dijalankan seorang pemimpin. Abdurrahman Wahid, misalnya, senantiasa mempergunakan referensi seperti istikharah, petunjuk kyai, dan simbol-simbol spiritual keagamaan untuk menjustifikasi kebijakan pemerintahannya. Ziarah ke makam para ulama, kyai kharismatik, dan para wali sering dilakukan selama ia menjalankan roda pemerintahan.

Masih dalam konteks pemanfaatan

simbol-simbol agama oleh para aparat pemerintah atau politisi untuk legitimasi kekuasaan, tampak dari tindakan mereka dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tidak sedikit ditemui para politisi dan aparat pemerintah memasang kaligrafi di kantornya, menempelkan stiker-stiker keislaman di mobil dan rumahnya, dan berbagai atribut keagamaan lainnya. Para aparat pemerintah dan politisi juga ramai-ramai melakukan ibadah haji dan safari umrah dengan membawa rombongan yang cukup banyak. Semua ini dilakukan bukan tanpa tendensi dan dalam konteks kekosongan, melainkan sarat dengan muatan dan konteks kepentingan politik.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa agama itu merupakan alat legitimasi yang cukup kuat bagi pencarian, pembagian, dan pelestarian kekuasaan, di samping instrumen-instrumen politik lainnya yang bersifat legal-rasional. Tepat apa yang dikatakan Berger bahwa agama secara historis memang merupakan instrumentalitas legitimasi yang paling tersebar dan efektif. Agama melegitimasi sedemikian efektifnya karena agama menghubungkan konstruksi realitas rawan yang empirik dengan realitas puna yang keramat dan transendental (Zainuddin Maliki, 2004: 29).

Pemanfaatan agama dalam konstruksi kekuasaan oleh para aparatus pemerintahan dan politisi, khususnya dari kalangan kaum santri, tidak dapat memberikan jaminan kepastian akan



---

dimanfaatkan untuk kerangka moralitas dalam berkuasa. Sebaliknya, agama bisa diatur sedemikian rupa dan dimanfaatkan penguasa untuk kepentingan politik praktisnya. Memasukkan agama dalam bagian simbol-simbol kekuasaan adalah sebagai wujud pemenuhan terhadap tuntutan konstituen, sementara penguasa tersebut pada sisi lain memiliki agenda dan bentuk kesadaran spiritualitas dan moralitasnya sendiri, sebagaimana dikatakan Machiavelli, yakni moralitas berkuasa. Dengan kata lain, moralitas agama adalah instrumen dominasi (Zainuddin Maliki, 2004: 40).

### Penutup

Interaksi kaum santri dengan politik senantiasa memiliki kesinambungan dengan perebutan kapling kekuasaan. Pada tataran praktis, politik tidak dimaknai sebagai instrumen penataan formasi kehidupan sosial yang demokratis, melainkan juga sebagai instrumen dalam memperebutkan, menjalankan, dan melanggengkan kekuasaan. Tindakan politik kaum santri sendiri dalam konstruksi demikian itu dilakukan dengan mekanisme politik yang legal-rasional melalui partai politik dan proses-proses politik seperti negosiasi, koalisi, aliansi, dan bahkan konfrontasi politik. Pencarian, penggunaan, dan pelanggengan kekuasaan ditempuh pula dengan memanfaatkan atribut-atribut keagamaan secara simbolik-formalistik sebagai instrumen dominasi. Oleh karena itu, moralitas dan spiritualitas

kaum santri dalam memanfaatkan simbol-simbol agama tidak serta merta untuk kepentingan kerangka moralitas kekuasaan, melainkan dominasi dan hegemoni.

### Daftar Pustaka

- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Duverger, Maurice. 1989. *Sosiologi Politik*. Terjemahan Daniel Dhakidae. Cetakan Keempat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Freire, Paulo. 2001. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terjemahan Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia.
- Karim, Gaffar. 1995. *Metamorfosis, NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Parsons, Talcott. 1974. *The Structure of Social Action: a Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. New York U.S.A: The Free Press, a Division of Macmillan Publishing Co. Inc.

Simon, Roger. 2000. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IN-SIST.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, cetakan keempat, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syamsuddin, M. Din. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos.

Daftar Pustaka  
 Adhoni, Charles F. 1997. *Kebudayaan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.  
 Dreyfus, Maurice. 1988. *Sociology of Politics*. Toronto: Harcourt Brace Jovanovich.  
 Fatah, Fatah. 2001. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Kencana dan Pustaka Pelajar.  
 Jovanov, Doina. 1988. *Sociology of Politics and the State*. Toronto: Harcourt Brace Jovanovich.  
 Kadir, Oemar. 1997. *Islam dan Politik*. Yogyakarta: LKiS.  
 Mulya, Zamrudin. 2004. *Agama Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
 Pons, John. 1974. *The Structure of Political Action: A Theory of Social Theory and Social Movement*. New York: Basic Books.  
 U.S.A. The Free Press, a Division of Macmillan Publishing Co. Inc.

sebagai wujud pemerintahan terdapat  
 tindakan kolektif, kesadaran politik  
 untuk perubahan sosial masyarakat dan  
 bentuk kesadaran spiritualitas dan  
 moralitasnya sendiri, sebagai mana  
 dikemukakan oleh van der Meer  
 (1999: 100).  
 (Van der Meer, 1999: 100)  
 Peningkat  
 kesadaran politik dengan politik  
 ekonomi melalui pembangunan  
 dengan pembangunan politik. Pada  
 tahun politik tidak hanya  
 sebagai instrumen gerakan politik  
 kolektif sosial yang demokratis,  
 tindakan juga sebagai tindakan dalam  
 masyarakat, masyarakat, dan  
 masyarakat politik. Tindakan  
 politik baru sendiri sendiri dalam  
 kesadaran dan tindakan kolektifnya  
 kesadaran politik yang kolektif  
 melalui politik dan proses-proses  
 politik seperti politik, politik dan  
 politik kolektif politik. Peningkat  
 program dan kebijakan kolektif  
 dengan cara dengan masyarakat  
 kolektif sebagai instrumen dominan  
 kolektif dan kesadaran dan spiritualitas